



KABUPATEN
GRESIK

BerAKHLAK  **bangga**
Berkualitas Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

Perubahan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
2021-2026

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Gresik. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang didasarkan perubahan kebijakan terkait nomenklatur urusan kabupaten/kota yang dimutakhirkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan juga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, visi dan misi program prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Dengan tersusunnya perubahan renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dapat diimplementasikan dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen perubahan rencana strategis ini disampaikan terima kasih, namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak

Gresik, 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra Kementrian atau Lembaga	
3.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	46
3.3.2 Indeks Daya Saing Daerah	48
3.3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	51
3.3.4 Indeks Inovasi Daerah.....	52
3.3.5 Indeks Pembangunan Gender	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	81
8.1 Pedoman Transisi	81
8.2 Kaidah Pelaksanaan	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.....	9
Tabel 2.2	Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Pratama.....	11
Tabel 2.3	Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Administrator, Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional	15
Tabel 2.4	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Periode Renstra 2016-2021.....	31
Tabel 2.5	Capaian Program Sekretariat Daerah Periode Renstra 2016-20.....	32
Tabel 2.6	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Periode Renstra 2016-2021	35
Tabel 2.7	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2026.....	36
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021-2026	38
Tabel 3.1	Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	42
Tabel 3.2	Penelaahan Misi terhadap Fungsi Sekretariat Daerah	44
Tabel 3.3	Keterkaitan Program Nawakarsa dan Fungsi Sekretariat Daerah	46
Tabel 3.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	47
Tabel 3.5	Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020	51
Tabel 3.6	Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020	52
Tabel 3.7	Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB	55
Tabel 3.8	Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah terhadap	57
Tabel 4.1	Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	62
Tabel 4.2	Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	63
Tabel 4.3	Penetapan Target Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	65
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Sekretariat Daerah	69
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	70
Tabel 6.1	Program Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	75
Tabel 6.2	Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	77
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	35
Gambar 2.2	Capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2014-2021	37
Gambar 3.1	Pemetaan Aspek Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020	52
Gambar 3.2	Pemetaan Pilar Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020	52
Gambar 3.3	Pemetaan Dimensi Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, Perencanaan Pembangunan Daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJM meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian. luar daerah diperlukan untuk meresmikan.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari. Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan Kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021. Kabupaten Gresik periode 2021 – 2026 dipimpin oleh H. Fandi Ahmad Yani SE sebagai Bupati dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd sebagai Wakil Bupati. Menurut Pasal 261 (4), undang-undang Nomor 23 Pada tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Melandasi penetapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada 25 Agustus 2021, setiap perangkat Daerah termasuk

Sekretariat Daerah menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan secara strategis mendukung pencapaian program-program prioritas Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas Nawakarsa.

Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan karena menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang memuat mengenai perubahan indikator setiap sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Perumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);

- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
- 10) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)'
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 22) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
- 23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
- 25) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- 27) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 32) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 37) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
- 40) Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 44) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13).
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
- 49) Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki maksud sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana fungsi sekretariat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 29 ayat ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 2.1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 2.2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - 2.3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - 2.4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - 2.5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Tujuan operasional dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada tataran sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;
2. Menjabarkan arah kebijakan dan tujuan pembangunan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah untuk membantu bupati/wali kota dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dimana tahun 2026 adalah masa transisi periode perencanaan jangka menengah selanjutnya;
4. Menjadi pedoman monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kinerja jangka menengah dan tahunan di lingkup Sekretariat Daerah;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Daerah di lingkup Sekretariat Daerah;
6. Menjadi pedoman penyelerasan rencana lintas sektoral pembangunan Daerah yang terkait dengan lingkup Sekretariat Daerah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Reformasi Birokrasi, Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) dan rencana sektoral lainnya;

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (Delapan) bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAERAH

Memuat informasi tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan

4. BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menyajikan uraian strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Uraian strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam Menyusun program pembangunan daerah.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai pedoman perencanaan daerah 5 tahunan yakni Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 hingga Tahun 2026 .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaantugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik memiliki fungsi

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

Tabel 2.1 Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas/Kelompok JF
IIa	IIb	IIIa	
Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan	Kelompok Jabatan Fungsional
		Bagian Hukum	Kelompok Jabatan Fungsional
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kelompok Jabatan Fungsional
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Kelompok Jabatan Fungsional
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kelompok Jabatan Fungsional
			Subbagian Sumber Daya Alam.
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kelompok Jabatan Fungsional
	Asisten Administrasi	Bagian Organisasi	Kelompok Jabatan Fungsional

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas/Kelompok JF
IIa	IIb	IIIa	
	Umum	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Subbagian Protokol; Kelompok Jabatan Fungsional
		Bagian Umum	Kelompok Jabatan Fungsional

Pemetaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Pratama

Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan 9. Kecamatan.

Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; 6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan 7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi : 1. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Pertanian;

Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			kebijakan urusan di lingkup bidang tugasnya; 2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif di lingkup bidang tugasnya; 3. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang tugasnya; dan 4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	7. Dinas Perikanan; 8. Dinas Tenaga Kerja; dan 9. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
		Asisten Administrasi Umum	Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :	1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Pimpinan Tinggi Pratama	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			1. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan urusan di lingkup bidang organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum; 2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif di lingkup bidang organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi; 4. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; 5. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum; dan 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	4. Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Inspektorat; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 8. Dinas Pendidikan; dan 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.3 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Administrator ,Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerjasama daerah. Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomidaerah; 4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja samadanotonomi daerah; 5. penyusunan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah; 6. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah; 7. pengendalian pelaksanaan pelimpahan urusan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah dan/atau penyelenggara pemerintahan dibawahnya; 8. pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan 9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
Bagian Hukum	Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian administrasi perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum serta kajian, evaluasi dan dokumentasi produk hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan Produk Hukum Daerah, bantuandan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; 2. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; 3. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; 4. pengoordinasian pelaksanaan	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang keagamaan dan	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelayanan administrasi perumusan kebijakan program pembangunan daerah, pengendalian program pembangunan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan program pembangunan daerah;	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	2. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah; 3. perumusan strategi dan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan daerah; 4. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan daerah; 5. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas program pembangunan; 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan 7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang Perekonomian dan urusan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:	Kelompok Jabatan Fungsional Subbagian Sumber Daya Alam.	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah 1. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam; 2. menyusun bahan rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kelistrikan, tata kelola pasca tambang dan tata kelola hasil tambang yang ada keterkaitan dengan pemerintah kabupaten; 3. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	1. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian, BUMD, BLUD dan urusan sumber daya alam; 2. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata, tenaga kerja, perhubungan, BUMD, BLUD dan urusan sumber daya alam; 3. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD, BLUD dan urusan sumber daya alam; 4. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD, BLUD dan		- petunjuk pelaksanaan prosedur pengelolaan sumber daya alam dan pasca tambang; 4. menyusun bahan rapat koordinasi urusan sumber daya alam; 5. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penerapan kebijakan urusan sumber daya alam; 6. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan sumber daya alam; dan 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	urusan sumber daya alam; 5. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, BUMD, BLUD dan sumber daya alam; dan 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa. Dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa, secara teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan	Kelompok Jabatan Fungsional	1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa; 2. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 3. pelaksanaan pengoordinasian pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Organisasi	Bagian Organisasi mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik,	Kelompok Jabatan Fungsional	1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	kinerja dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 1. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 2. pengoordinasian perumusan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.		

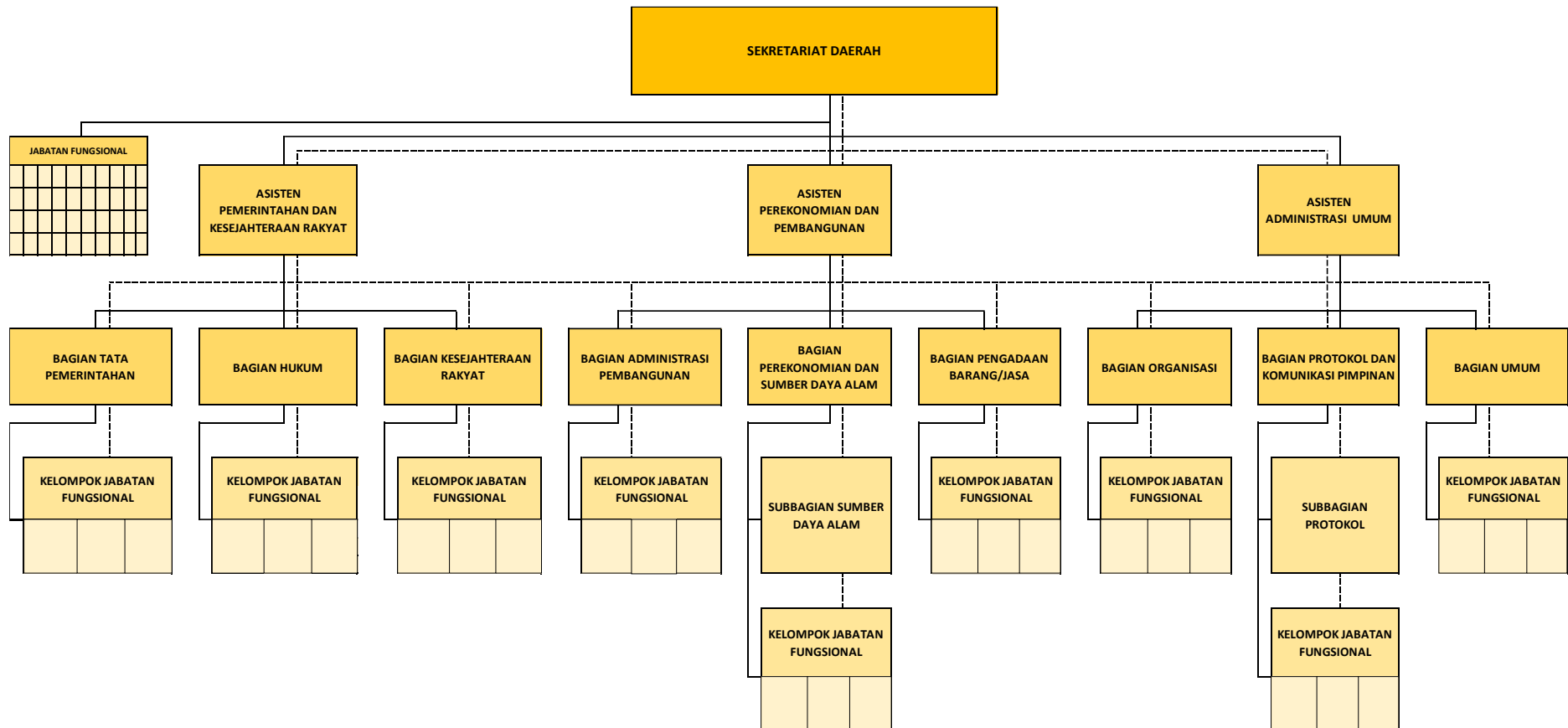
Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan tugas keprotokolan, komunikasi pimpinan dan mengoordinasikan dokumentasi dan pimpinan dan/atau kegiatan yang berskala Pemerintah Daerah.	Subbagian Protokol;	1. menyusun rencana kegiatan keprotokolan; 2. menyusun dan mengakselerasi kegiatan pimpinan agar dapat terlaksana dengan tertib, baik dan sesuai rencana; 3. menyusun jadwal dan agenda kegiatan pimpinan atau kegiatan pemerintah skala kabupaten; 4. melaksanakan koordinasi agenda kenegaraan dan/atau agenda yang melibatkan pimpinan; 5. melaksanakan koordinasi keprotokolan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain untuk menjamin kelancaran kegiatan pimpinan; 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keprotokolan; dan 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, menyelenggarakan fungsi: 1. pengoordinasian pelaksanaan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan; 2. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian standard operasional prosedur keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan; 3. pelaksanaan pengoordinasian pengendalian penyampaian informasi kepada media dan membangun komunikasi serta penyampaian hak jawab pimpinan atas pemberitaan yang dianggap perlu penjelasan; 4. pengoordinasian penyusunan jadwal keprotokolan, program rutin pemerintah dan konsolidasi kegiatan pimpinan; 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	pelaporan pelaksanaan kebijakan hubungan masyarakat dan protokol; dan 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Umum	Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan tugas-tugas umum, rumah tangga dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah; 2. perumusan kebijakanketata usahaan, kepegawaian dan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah; 3. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan Bupati/Wakil Bupati; 4. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Daerah; 5. pelaksanaan jamuan kantor,	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	makan/minum kegiatan pimpinan, pramu pimpinan, kesehatan pimpinan dan pengelolaan keuangan pimpinan dan administrasi perjalanan dinas; 6. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang di lingkungan Sekretariat; 7. pengoordinasian penyusunan kebutuhan barang yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; 8. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian; 9. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan barang yang penggunaannya tercatat sebagai barang yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; 10. pengendalian pelaksanaan sistem administrasi persuratan, kearsipan secara elektronik dan maupun manual; 11. pelaksanaan penyiapan undangan dan pengaturan sarana, prasarana dan makan/minum untuk tamu, seremonial, dan rapat Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah; 12. pelaksanaan penyiapan makan/minum rapat dan/atau kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak		

Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas/Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas dan Fungsi
	dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 13. pelaksanaan monitoring kebersihan dan kenyamanan kantor, lingkungan kantor dan rumah dinas yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan 14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.		

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

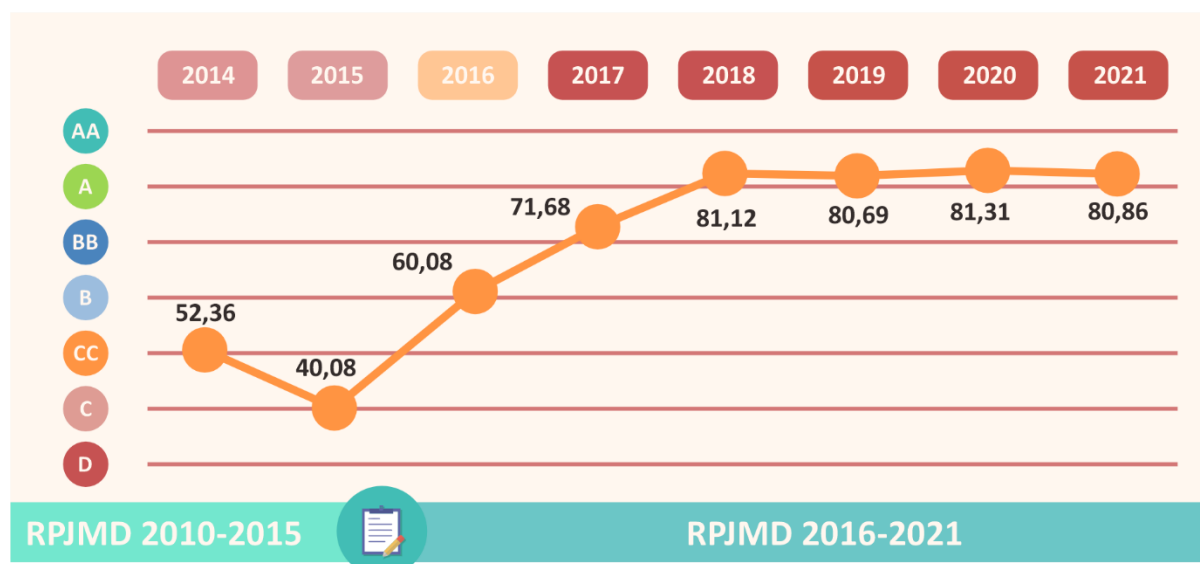


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 memiliki 276 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 129 ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (46,74%) dan 147 tenaga harian lepas (53,26%) yang dalam perkembangannya akan menjalani mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari capaian kinerja utama perangkat Daerah selama periode jangka menengah sebelumnya atau mengacau pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Meninjau RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka kinerja utama Sekretariat Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah pada misi kedua dengan indikator kinerja utama Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.



Gambar 2.2 Capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2014-2021

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi kunci keberhasilan dalam harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud merupakan titik ungkit dalam menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta memenuhi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 memberikan landasan strategis dalam perencanaan sektoral maupun secara holistik dengan meletakkan level perencanaan secara terstruktur dari tingkatan tujuan, sasaran, sampai dengan program pembangunan dan merumuskan Indikator Kinerja Utama Daerah. Arsitektur perencanaan yang sistematis mewujudkan harmonisasi akuntabilitas kinerja di tingkat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2016, dengan melandasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Predikat AKIP Kabupaten Gresik meningkat dramatis melonjak 2 (dua) tingkat ke predikat B dengan nilai komulatif 60,08 atau meningkat signifikan 20 poin

dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2017 menjadi predikat BB dengan nilai 71,68. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020, Kabupaten Gresik memperoleh predikat A secara berturut-turut. Pada tahun 2018, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 80,12 kemudian meningkat tipis 0,57 poin Tahun 2019 dengan nilai 80,69. Pada Tahun 2020 kembali mendapatkan predikat A dengan peningkatan 0,62 poin. Capaian termutakhir pada tahun 2021 kembali mendapatkan predikat A dengan nilai 80,86.

Kinerja utama yang berasal dari Sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis dimana pada periode 2016-2021, Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh masing-masing Asisten dengan indikator kinerja utama meliputi Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Persentase produk hukum yang ditetapkan; Persentase Jumlah Penerima layanan Bidang Kesra; Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam; Persentase jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD; Persentase proses pengadaan secara elektronik; Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B; Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik; Persentase jumlah informasi yang disampaikan pada masyarakat. Ditinjau dari capaian sasaran Renstra, sebagian besar indikator kinerja utama mampu memenuhi target kecuali pada Persentase produk hukum yang ditetapkan, Persentase Jumlah Penerima layanan Bidang Kesra, dan Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik.

Tabel 2.4 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah periode Renstra 2016-2021

No	Sasaran Renstra Setda 2016-2021	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
1	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum	Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Persentase produk hukum yang ditetapkan	100%	100%	80,64%
		Persentase Penerima Bansos	100%	100%	99.16%
2	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		Persentase jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD	95,26%	95,26%	64.58%
		Persentase proses pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya pelayanan	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B	100%	100%	100%

No	Sasaran Renstra Setda 2016-2021	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
	administrasi pengelolaan keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kehumasan	Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik	95,26%	95,26%	84,81%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	100%	100%	99,02%

Pada tataran program, Sekretariat Daerah melaksanakan 17 program dengan 22 indikator kinerja program meliputi Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah, Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur; Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur; Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan; Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan; Persentase Pengesahan Produk Hukum Daerah; Persentase PD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP); Persentase fasilitasi dan koordinasi kehumasan daerah; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Aset, dan Barang Daerah; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum; Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Persentase inventarisasi unsur rupa bumi; Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH; Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat; Persentase PD yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya; Persentase PD yang menyusun Anjab dan ABK Baik; Persentase PD/Unit Kerja menyusun SOP Tata Laksana; Persentase PD yang menyusun laporan kinerja baik; Persentase Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik (Terhadap Kebutuhan Informasi); dan Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Pada tahun 2020, sebanyak 20 indikator kinerja program telah mencapai target sedangkan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yaitu Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Persentase inventarisasi unsur rupa bumi;

Tabel 2.5 Capaian Program Sekretariat Daerah periode Renstra 2016-2021

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	129,74%
6.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengesahan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	80,41%
7.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	60%	70%	80%	69%	100%
8.	Program Fasilitasi Kehumasan Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi kehumasan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Pemerintahan Umum	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	N/A	6%	11%	17%	
		Persentase inventarisasi unsur rupa bumi	N/A	6%	11%	33%	
12.	Program Fasilitas Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Fasilitas Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Program Fasilitas Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Program Fasilitas Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	80,62%
15.	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase PD yang menyusun Anjab dan ABK Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase PD/Unit Kerja menyusun SOP Tata Laksana	55%	60%	65%	100%	100%
		Persentase PD yang menyusun laporan kinerja baik	55%	65%	70%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
16.	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik (Terhadap Kebutuhan Informasi)	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Program Fasilitas Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	100%	100%	100%	100%	165%

Selain pengukuran terhadap kinerja utama dan capaian program, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dinilai dari realisasi kinerja keuangan dan capaian pembangunan (fisik). Selama tahun 2016-2020, capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 97,85% sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 93,81%. Adapun rata-rata capaian keuangan lebih rendah sebesar 81,53% dengan capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 86,07% sedangkan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 77,69%. Pada tahun 2021 capaian keuangan sekretariat daerah sebesar 90,77% dan capaian fisik sebesar 97,99%.

Tabel 2.6 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah periode Renstra 2016-2021

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fisik (%)	93,81	94,87	97,47	97,85	97,37	97,99
Keuangan (5)	86,07	77,69	81,08	79,17	83,63	90,77

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh masing-masing Asisten dengan indikator kinerja utama meliputi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Persentase produk hukum yang ditetapkan; Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM; Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan; Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan; Efektivitas perumusan kebijakan administrasi pembangunan; Persentase perangkat daerah yang memenuhi minimal 90% target kinerja penyerapan APBD; Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai Dari LKPP); Predikat AKIP; Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan; Indeks Kepuasan Pelayanan Umum.

Tabel 2.7 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah periode Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Renstra Setda 2021-2026	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2021	2021	2021
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3	3,3121	100%
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	95,45%	95,45%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	100%	111%
		Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM		-	-
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	85%	68,75%	80,88%
		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 3	Level 3	100%
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	100 %	100 %	100 %
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %	100%	100%
3	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi	Predikat AKIP	81,5	80,86	99,21%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	100%

No	Sasaran Renstra Setda 2021-2026	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2021	2021	2021
	secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat Daerah pada tahun 2021-2026 dianalisa melalui metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Secara strategis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan melengkapi isu-isu strategis yang selanjutnya dirumuskan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan. Perumusan analisa SWOT Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat Daerah pada tahun 2021-2026

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Komitmen Gresik Baru mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas	Sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD belum sepenuhnya terintegrasi hanya 42,17%	Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>)	Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (<i>health care</i>), turisme (<i>tourism</i>), jasa logistik (<i>logistic services</i>), e-ASEAN, jasa angkutan udara (<i>air travel transport</i>), produk berbasis agro (<i>agrobased products</i>), barang-barang elektronik (<i>electronics</i>), perikanan (<i>fisheries</i>) jika tanpa disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;
Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B		
Opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut	Setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95	Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (adminduk), medical record (kesehatan), NPWP (fiskal), NISN (pendidikan);		
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten			
Rasio Kemandirian Fiskal 69,43%	Pemantauan kinerja tidak dapat dilaksanakan secara real time	Program-program pembangunan sektoral	Diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas mencapai 93,03%	Indeks Profesionalitas ASN mengalami penurunan	Pengembangan <i>Artifisial Intelligent</i> dalam sistem pengambilan keputusan	Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik prima, Kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan publik masih dibayangi stigma kerumitan birokrasi
Layanan publik berbasis elektronik meningkat mencapai 87,23%	Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (Digital Devid) antara Desa dan Kota	Komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDG'S Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet	Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan illegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik;
Inovasi Daerah meningkat	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik	Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung Smart City	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan Perkembangan interaksi media sosial dan informasi hoax; Fenomena urban frawl di pinggiran kota
Pertumbuhan ekonomi diatas rerata nasional dan Jawa Timur sebelum adanya pandemi			
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW			

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Pembentukan Kawasan Industri IPPE, KIG, dsb	Tingkat Kemiskinan mencapai 12,40% diatas Jawa Timur dan Nasional	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah)	Cybercrime terkait penyalahgunaan data dan informasi vital
Database pelayanan kesehatan telah baik melalui Riset Kesehatan Dasar	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2019		Pandemi Covid-19
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,19 tanah pemerintah daerah yang bersertifikat hanya 31,32%	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2020 mencapai 0,95% meningkat secara <i>year on year</i>	Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi meliputi banjir Kali Lamong, kekeringan, dan kebakaran;
	Gresik belummiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada	Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 91,79% Komitmen pemerintah Gresik Baru dalam melaksanakan SDG'S	Kabupaten Gresik bersanding dengan Kota cilegon dimana industri kimia berdampingan dengan permukiman; Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
	Keterbatasan Kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan energi alternative.	Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik-Lamongan-Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara	Investasi yang didominasi oleh sektor manufaktur dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi;
		Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampean	
		Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 meliputi perumusan kebijakan strategis yang dinamis, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan pelaporan realisasi fisik pembangunan yang semu. Identifikasi permasalahan Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dirumuskan dari berbagai faktor penghambat guna capaian kinerja baik pada tataran sasaran, program hingga kegiatan selama periode 2016-2020. identifikasi permasalahan dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian	Permasalahan Utama Pelayanan
Bagian Tata Pemerintahan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
	Optimalisasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan
	Pembakuan rupa bumi secara realtime, faktual dan akuntabel
	Keberdayaan Kelurahan
Bagian Hukum	Keterbatasan sumber daya dalam legal drafting
	Harmonisasi peraturan perundang-undangan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Optimalisasi perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
Bagian Administrasi Pembangunan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
	Manajemen pembangunan berbasis Open Government Partnership

Bagian	Permasalahan Utama Pelayanan
	Efektivitas analisis standar biaya
	Pelaksanaan pengendalian dan monitoring secara realtime melalui pemanfaatan teknologi informasi
	Perumusan kebijakan pembangunan untuk pembiayaan alternatif pembangunan
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
	Pengarusutamaan energi alternatif
	Perumusan kebijakan dilingkup perekonomian inklusif
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan kapasitas sumber daya pengadaan barang dan jasa
	Optimalisasi pengadaan barang dan jasa untuk produk/jasa lokal
Bagian Organisasi	Validitas dan Reabilitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah
	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah
	Pengarusutamaan Proses bisnis dalam penyelenggaraan pelayanan utama oleh perangkat Daerah dan/atau pelaksanaan pembangunan
	Peningkatan tata kelola organisasi yang dinamis
	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design</i> , <i>by process</i> , dan implementatif
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Optimalisasi kegiatan keprotokolan untuk menunjang Kinerja Kepala Daerah di masa pandemi
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam fasilitasi komunikasi
Bagian Umum	Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur secara berkelanjutan
	Optimalisasi pemeliharaan bangunan gedung dan/atau aset

Bagian	Permasalahan Utama Pelayanan
	milik sekretariat Daerah
	Pengembangan pengelolaan aset dan keuangan berbasis akrual

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.**

Berlandaskan visi pembangunan dimaksud ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaantugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif maka penelaah visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Penelaahan Misi terhadap Fungsi Sekretariat Daerah

No	Misi	Telaahan Fungsi	Leading Sector
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan	Kebijakan Daerah terkait tata kelola pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Bagian Organisasi
		Kebijakan Daerah terkait Tata Kelola Pelayanan Publik	Bagian Organisasi

No	Misi	Telaahan Fungsi	Leading Sector
	kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Kebijakan Daerah terkait Pemanfaatan teknologi informasi	Lintas Bagian
2.	Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Kebijakan Daerah terkait daya saing daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
			Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Kebijakan Daerah terkait pembangunan berkelanjutan	Bagian Administrasi Pembangunan
		Kebijakan Daerah terkait kesetaraan akses pembangunan	Lintas Bagian
3.	Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Kebijakan Daerah terkait perimbangan perekonomian	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Kebijakan Daerah terkit pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Kebijakan daerah terkait pengarusutamaan keberagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Kebijakan daerah terkait Ketenagakerjaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Kebijakan Daerah terkait pengentasan kemiskinan Daerah	Lintas Bagian
Unsur penunjang			Bagian Hukum
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Bagian Umum
			Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Program pembangunan prioritas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disebut dengan Nawakarsa. Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakarsa dirumuskan dalam berbagai output kunci yang terkait dengan Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Program Nawakarsa dan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Bagian Pengampu
1	Gresik Akas	Gresikpedia	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2	Gresik Akas	Gresik rembug akur	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Gresik Seger	Gresik santri	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Gema Karya	Optimalisasi aset pemda	Bagian Administrasi Pembangunan
			Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

3.3 Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga

Telaah renstra terhadap kementerian dan/atau lembaga ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang diampu oleh Sekretariat Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Daya Saing Daerah, dan Indeks Pembangunan Gender.

3.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 6 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 71,9 atau naik mencapai 9,19 dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami peningkatan sebesar 2,71 menjadi 69,40. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,07 point menjadi 69,47, peningkatan ini tentunya

dikarenakan tata kelola birokrasi, budaya integritas, kinerja, dan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Gresik semakin baik.

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	62,71	71,9	63,3	66,69	69,40	69,47

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan responsif selaras dengan 8 (area) perubahan reformasi dengan kebijakan sebagaimana berikut:

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi;
 Dalam mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa.

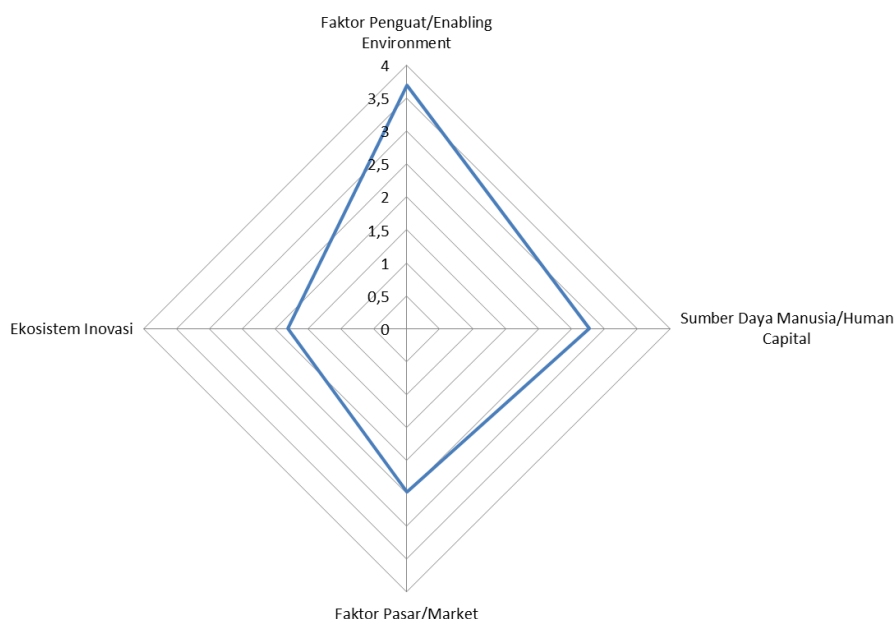
2. Deregulasi Kebijakan
Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.
3. Penyederhanaan Organisasi
4. Perbaikan Tata Laksana
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/ formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah
7. Penguatan Pengawasan
Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

3.3.2 Indeks Daya Saing Daerah

Konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan daya saing diperlukan untuk melihat dan menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar

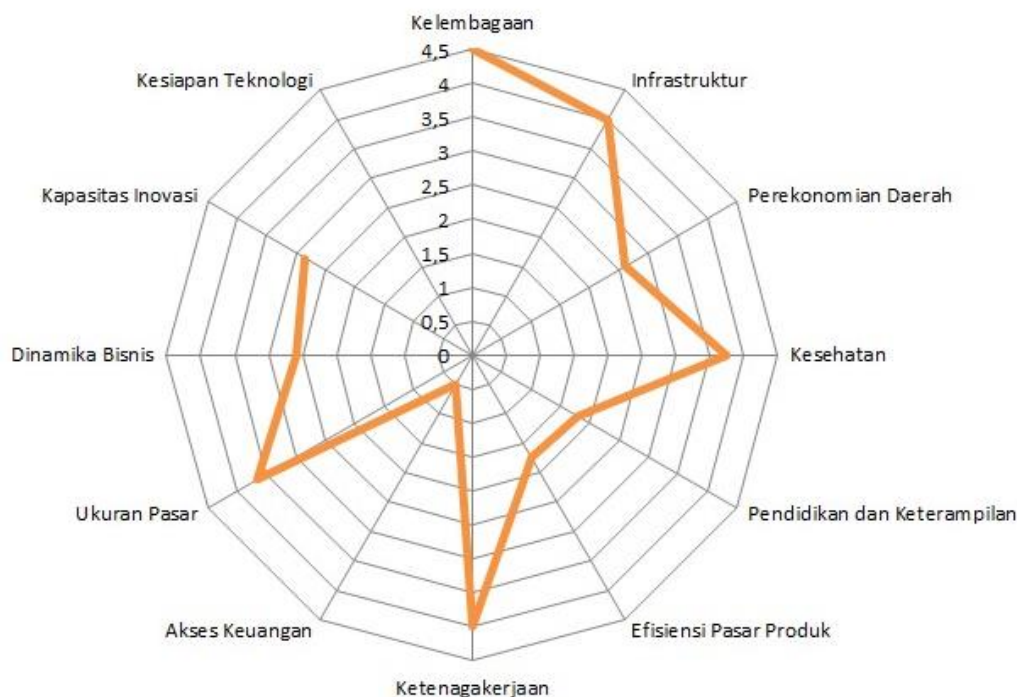
bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tatakelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tatakelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah. Berlandaskan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 diketahui bahwa nilai IDSD Kabupaten Gresik mencapai 2,69 dari interval 1 s.d. 5 dengan interpretasi semakin tinggi nilai indeks maka daya saing semakin tinggi/baik/kuat. Nilai indeks tersebut diperoleh dari 4 (empat) aspek yaitu (1) Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai tertinggi 3,70 diikuti secara berturut-turut yaitu sumber daya manusia/*human capital* dengan nilai 2,7; faktor pasar/*market* 2,48 dan ekosistem inovasi dengan nilai terendah 1,81.



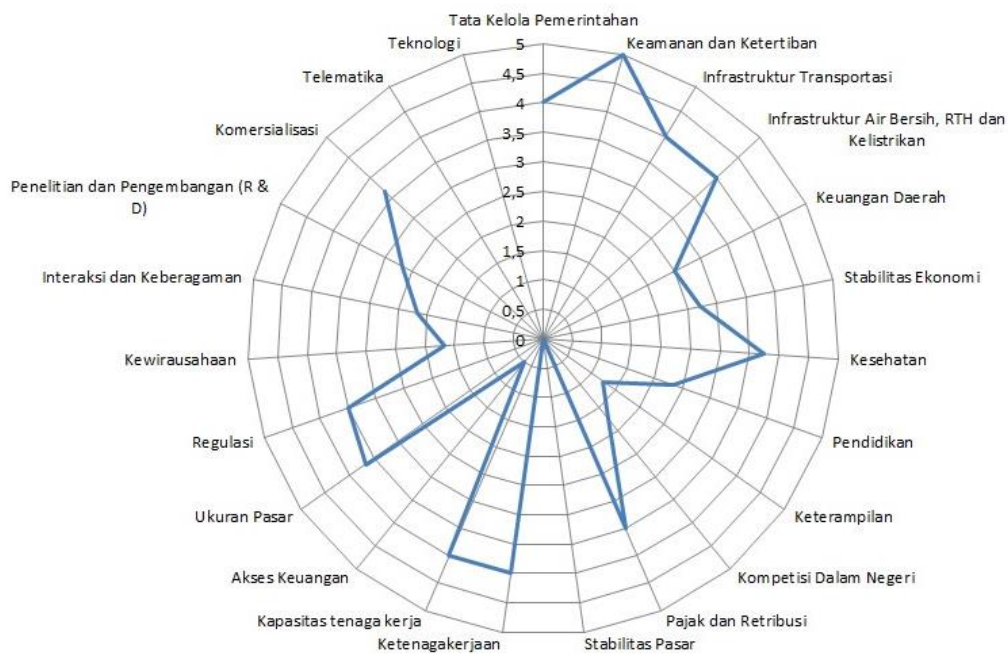
Gambar 3.1 Pemetaan Aspek Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada 12 (dua belas) pilar daya saing Daerah dijelaskan bahwa pilar kelembagaan memiliki nilai tertinggi dengan raihan 4,5 diikuti oleh infrastruktur dan ketenagakerjaan masing-masing 4,00. Terdapat 2 (dua) pilar pada range 3-4 yaitu kesehatan dengan nilai 3,75 dan ukuran pasar 3,67. Sedangkan 3 (tiga indikator) pada range 2-3 yaitu kapasitas inovasi 2,83, perekonomian Daerah 2,61, dan dinamika bisnis 2,58. Nilai indeks terendah masing-masing secara berturut turut adalah pendidikan dan keterampilan 1,79; efisiensi pasar produk 1,75; akses keuangan 0,50. Adapun kesiapan teknologi tidak memiliki nilai.



Gambar 3.2 Pemetaan Pilar Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada hasil pemetaan Dimensi dijelaskan bahwa nilai keamana dna ketertiban memiliki nilai sempurna sedangkan 5 (lima) dimensi menduduki nilai tertinggi kedua dengan identik 4,00 yaitu Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan; Kapasitas tenaga kerja; Tata Kelola Pemerintahan; Infrastruktur Transportasi; Ketenagakerjaan. Pada range 3-4 terdapat 5 (lima) indkator yaitu Kesehatan 3,75; Ukuran Pasar dan Komersialisasi masing-maisng 3,67; Pajak dan Retribusi dan Regulasi masing-masing 3,50. Sebanyak 5 (lima) indikator pada range 2-3 yaitu Stabilitas Ekonomi 2,7; Penelitian dan Pengembangan (R & D) 2,67; Keuangan Daerah 2,5; Pendidikan 2,33; dan Interaksi dan Keberagaman 2,17. Nilai dimensi terendag secara berturut-turut adalah Kompetisi Dalam Negeri 1,75; Kewirausahaan 1,67; Keterampilan 1,25; Akses Keuangan 0,50. Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidka memiliki nilai yaitu Stabilitas Pasar, Telematika, dan Teknologi.



Gambar 3.3 Pemetaan Dimensi Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

3.3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penilaian untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih tergolong baru, dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Maka dari itu data yang tersaji hanya memuat tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 3.5 Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 2020

Nama Indeks	2018	2019	2020
SPBE	2,92	3,10	3,40

Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur mengalami trend yang selalu meningkat. Tahun 2019 indeks SPBE mengalami peningkatan sebesar 0,18 dibandingkan base line tahun 2018 menjadi 3,10. Selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 0,30

dibandingkan tahun 2019 menjadi 3,40. Sedangkan data Indeks SPBE di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020

Aspek Indeks	2018	2019	2020
SPBE	2,56	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

3.3.4 Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah perlu dilakukan penilaian inovasi daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dengan mekanisme input data inovasi Daerah Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri Melalui Sistem Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (SAIID).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2019. Pada tingkat Provinsi, Jawa Barat memperoleh predikat tertinggi sangat inovatif dengan nilai 59.350 disusul Provinsi DKI Jakarta dan Sumatra Barat. Sedangkan Pada tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Banyuwangi berada Pada Urutan pertama tingkat kabupaten dan Kota Sangat Inovatif, disusul dengan Makasar, Situbondo dan Bandung. Sedangkan Kabupaten Gresik berada pada urutan 34 dengan predikat Sangat Inovatif dengan nilai indeks 10.060.

3.3.5 Indeks Pembangunan Gender

Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya Kestaraan dan Keadilan gender (KKG). Kestaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung

dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sebagian perangkat masih belum mengetahui keberadaan perda ini. Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender, tentu mengikat perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Pada periode 2016-2021, Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah. Rumusan Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan kualitas pembangunan laki-laki pada suatu wilayah. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Di Kabupaten Gresik, ketimpangan gender telah diatasi secara optimal dan bertahap pada seluruh aspek kehidupan terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 4 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya sebesar 91,07 di Tahun 2019 menjadi 91,06. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 meningkat sebesar 0.16 dari tahun 2019 menjadi 91,07. IPG Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2016 sebesar 90,05 menjadi 89,93.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks.

Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu, fenomena perubahan iklim (climate change) menjadi ancaman yang berpotensi memperparah situasi degradasi lingkungan yang terjadi, salah satunya, melalui meningkatnya intensitas terjadinya bencana di Kabupaten Gresik. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dan peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB

Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB
1. Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran 2. Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan dayaampungnya terhadap bahan pencemar 3. Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19 4. Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal 5. Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan 6. Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan 7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan	1. Jasa penyediaan air cukup baik 2. Daya tampung air dan udara sudah emasuki ambang batas 3. Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa	1. Kualitas Air dan sanitasi 2. Limbah dan persampahan 3. Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri 4. Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender

Rekomendasi 6 (Enam) Muatan KLHS

(1) Air Bersih (Jasa Layanan Penyediaan Air Bersih)

Berdasarkan Studi Neraca Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2037 (Rosalia, 2017), kebutuhan air diproyeksikan selama 20 tahun saat ini hingga pada tahun 2037 bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat terutama rencana daerah terlayani mengalami defisit atau surplus. Pada perhitungan proyeksi kebutuhan air diperoleh data sekunder dari PDAM yaitu nilai persentase cakupan wilayah pelayanan kabupaten sebesar 37,37% dengan penduduk kondisi eksisting pada tahun 2016. Dari hasil proyeksi menunjukkan bahwa angka proyeksi jumlah penduduk dengan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM lebih besar sehingga ada penduduk yang tidak terlayani perpipaan PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan air tidak dapat terpenuhi dengan adanya

PDAM saja, namun juga membutuhkan peran seperti penyediaan air melalui HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik.

Sedangkan berdasarkan neraca air minum Kabupaten Gresik Tahun 2037, menunjukkan persentase pelayanan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM pada tahun 2037 sebesar 78,80% dengan total demand tahun 2037 sebesar 3,081 L/detik sedangkan total supply tahun 2037 sebesar 3.006 L/detik. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air minum bagi pelanggan domestik dan non domestik perpipaan PDAM Kabupaten Gresik tahun 2037 tidak mencukupi.

(2) Air Bersih (Jasa Layanan Pengaturan Air Bersih)

(3) Persampahan

Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yaitu TPA Ngipik yang beroperasi sejak tahun 2002. TPA Ngipik terletak di wilayah Gresik bagian tengah tepatnya di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik. Status lahan TPA Ngipik bukan milik Pemerintah Kabupaten Gresik, akan tetapi merupakan lahan pinjam pakai milik PT. Semen Gresik. Luas lahan TPA Ngipik sebesar 6 ha dengan daya tampung awal sebesar 400 m³ /hari. Timbunan sampah masuk TPA Ngipik pada tahun 2017 mencapai lebih dari 800 m³ /hari. Jumlah tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari daya tampung awal TPA Ngipik. Pada 2018 luas lahan yang tersisa untuk zona pembuangan hanya tersisa + 1 ha. Berdasarkan studi Pemodelan Pengelolaan Sampah Kota Sebagai Bahan Energi Alternatif di Kabupaten Gresik, 2015 kapasitas sampah deposit adalah 630.000 m³ atau 210.000 ton. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kapasitas TPA Ngipik menunjukkan bahwa kapasitas TPA Ngipik sudah tidak dapat menampung sampah lagi, maka dibutuhkan rencana perluasan TPA atau pembangunan TPA baru di Kabupaten Gresik.

(4) Pengaturan Perlindungan Bencana terhadap Perkembangan Permukiman Dan Perkotaan Di setiap wilayah Kecamatan menunjukkan adanya luasan lahan dengan kategori kemampuan sangat rendah untuk mengadaptasi bencana, beberapa di antaranya mencakup lebih dari 50% luasan wilayah kecamatan yaitu: Bungah, Cerme, Driyorejo, Gresik, Kebomas, Manyar, Ujung Pangkah. Bila dihubungkan dengan komposisi luasan lahan terbangun untuk kegiatan permukiman dan perkotaan, maka daerah dengan kemampuan adaptasi yang sangat rendah ini mempunyai potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya apabila terjadi bencana. Untuk itu, perlakuan pembangunan secara spesifik harus diterapkan pada lokasi lokasi tersebut untuk mengurangi resiko serta kerugian.

(5) Jasa Penyedia Air Bersih terhadap Cakupan Air bersih

Beberapa kecamatan menunjukkan kapasitas jasa penyediaan air yang rendah yaitu: Driyorejo, Kedamean, Manyar. Sedangkan bila dikaitkan dengan kondisi cakupan layanan air bersih, pada daerah daerah tersebut merupakan daerah dengan cakupan air bersih yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa daerah menunjukkan perkembangan populasi yang cukup tinggi sebagai akibat daerah tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan situasi di atas, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyediaan air, mengurangi penggunaan air bawah tanah untuk konsumsi agar ketersediaan air tidak lagi menjadi penghambat pencapaian target indikator tujuan TPB sebagai berikut. Berdasarkan data dari PDAM, diketahui

wilayah yang telayani oleh jaringan perpipaan PDAM, berikut hasil overlay antara jasa ekosistem penyedia air terhadap wilayah yang telayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Sebesar 46,15 km jaringan perpipaan terdapat di wilayah dengan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah.

(6) Jasa Pengatur Air terhadap. Permukiman

Kemampuan untuk mengatur air pada suatu daerah mengindikasikan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur ketersediaan air, distribusi, dan pencegahan bencana Hidrologi seperti yang saat ini terjadi. Selain itu, Eskalasi kejadian bencana di Indonesia, khususnya di Gresik adalah: menjadi sangat sering dan dengan tingkat dampak yang lebih luas. Pada fenomena ini, luasan permukiman menjadi perhatian dalam hubungannya meminimalisir produk/dampak dari bencana yang terjadi. Beberapa Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pengaturan air adalah:

- a. Kelompok kawasan sepanjang DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas yang menunjukkan beberapa kondisi spesifik yaitu: penurunan debit air pada musim kemarau, peningkatan sedimentasi, serta bahaya banjir pada musim penghujan
- b. Kelompok daerah yang belum maksimal cakupan layanan air bersihnya memerlukan inovasi sistem distribusi air bersih serta peningkatan kualitas sumber air baku, karena hasil pemantauan sumber air di Kabupaten Gresik sudah melebihi ambang batas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan pembangunan isu strategis Sekretariat Daerah memperhatikan perumusan isu strategis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penelaahan Isu Strategis Sekretariat Daerah dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.8 Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah terhadap

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan Pasca Pandemi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nasional	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkup Perubahan Iklim
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Perumusan kebijakan perekonomian inklusif
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	3.1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	3.2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Peningkatan tata kelola organisasi yang dinamis
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i>, dan implementatif
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4.4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Perumusan kebijakan pembangunan untuk pembiayaan alternatif pembangunan Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Banjir Kali Lamong
	4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
				Keberdayaan Kelurahan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Perumusan kebijakan dilingkup perekonomian inklusif
	4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Optimalisasi perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
	4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
	4.13	Pengarustamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
	4.14	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Parumusan Kebijakan Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan sekretariat Daerah dirumuskan dari sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, sasaran pertama dan kedua terkait dengan fungsi utama Sekretariat daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yaitu *sasaran pertama* meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *sasaran kedua* Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Adapun *sasaran kelima* yaitu mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan dengan indikator kinerja utama merupakan sasaran lintas urusan yang diampu tidak hanya sekretariat Daerah namun seluruh perangkat Daerah karena pengarusutamaan gender dilaksanakan di setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian hingga pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penelaahan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik maka tujuan Sekretariat daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.549	3.750	4.000	4.320	4.780	5.000	5.200	5.200

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma akuntabilitas berbasis kinerja maka sasaran kinerja merupakan cascading dari tujuan pembangunan yang dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
			Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi
			Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
		Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM
			Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah
			Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	<u>Predikat AKIP</u> <u>Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan</u> <u>Indeks Kepuasan Pelayanan Umum</u>

Tabel 4.3 Penetapan Target Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD dari Kemendagri	>3	>3	>3,1	>3,2	>3,25	>3,3	>3,35
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah kebijakan yang disahkan kepala Perangkat Daerah dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Jumlah Produk hukum yang diproses dibagi jumlah usulan produk hukum di kali 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	Hasil Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM	-	-	>75	>75	>75	>75	>75

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% penyerapan APBD dibagi jumlah Perangkat Daerah X 100%	85%	85%	85%	-	-	-	-
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ	(Level 2) Esensi	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 4) Strategis	(Level 4) Strategis
	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditetapkan dibagi jumlah usulan kebijakan kali 100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	Jumlah Capaian Kinerja BUMD dibagi Jumlah BUMD	-	-	-	75%	75%	75%	75%

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan dibanding jumlah administrasi pembangunan yang ditetapkan dikali 100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang capaian kinerja APBD minimal 80% dibagi jumlah Perangkat Daerah X 100%	-	-	-	75%	75%	75%	75%
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Berdasarkan Evaluasi Kemenpan RB	81,31	81,5	82	82,5	83	83,5	84
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Permen PanRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Permen PanRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi sekretariat Daerah dipetakan berdasarkan dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent. Pemetaan strategi (*strategy mapping*) secara seimbang dengan menggunakan perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya; Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*); Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Strategi sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Pengkoordinasian kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis open dan good government Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum Daerah, penyuluhan hukum, dan Evaluasi Hukum secara cepat, tepat, akuntable, dan harmonis
		Pengkoordinasian kebijakan kesejahteraan rakyat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Pengkoordinasian kebijakan dan inovasi strategis pembangunan Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing Pengkoordinasian kebijakan dan inovasi strategis perekonomian dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdaya saing Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara cepat, tepat, dan akuntable
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis	Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
		Pelaksanaan fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	secara responsif berbasis open dan good government Pelaksanaan fasilitasi ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan aset secara responsif berbasis open dan good government

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2021-2026
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis open dan good government didukung Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis open dan good government didukung

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2021-2026
		Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis open dan good government didukung Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2021-2026
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan di lingkup sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja
2025	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2021-2026
	dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
2026	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Gresik diselaraskan dengan Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran outcome maupun output selaras.

Adapun matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan mengacu sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sedangkan kerangka pendanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Program Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					Target akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		103.188.697.034	105.918.631.887	108.161.976.211	110.440.976.266	112.758.863.102	
Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,5 indeks	1,7 indeks	1,9 indeks	2,1 indeks	2,5 indeks	2,8 indeks	2,8 indeks
Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	84 Indeks	86 Indeks	88 Indeks	90 Indeks	91 Indeks	91 Indeks	91 Indeks
Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal "A"	75%	79%	83%	88%	92%	96%	96%
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		8.724.031.000	8.354.740.508	8.894.314.000	9.098.352.000	9.297.107.000	
Nilai evaluasi kinerja TPID	67 indeks	67,5 indeks	67,9 indeks	68,4 indeks	68,75 indeks	69 indeks	69 indeks

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target					Target akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3 indeks	3 indeks	3 indeks	3 indeks	3 indeks	3 indeks	3 indeks
Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		49.565.754.937	50.961.132.627	51.806.799.698	51.943.549.698	51.898.549.698	
Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Baik Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Persentase Perbup yang diproses	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Perda yang diproses	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Tabel 6.2 Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	KERANGKA PENDANAAN DAN TARGET												KONDISI AKHIR	KET.
			2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
SEKRETARIAT DAERAH				133.027.565.531		161.478.482.971		165.234.505.022		104.588.744.027		170.182.877.964		172.654.519.800		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				98.079.110.763,64		103.188.697.034,00		105.918.631.887,00		60.359.520.714,00		110.440.976.266,00		112.758.863.102,00		
	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	69	313.769.605	71	778.678.950	73	529.777.000	75	300.000.000	77	478.916.000	80	454.633.000	80 Unit Pelayanan	Bagian Organisasi
		Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan OPD	74%	231.780.663	76%	400.000.000	78%	529.777.000	80%	300.000.000	82%	478.916.000	84%	454.633.000	84%	
		Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah	5	322.240.081	5	400.000.000	5	529.778.801	5	400.000.000	5	478.918.802	5	454.633.368	5 Ranperbup	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan	23.979.526.777	1 Laporan	24.970.941.444	1 Laporan	25.604.892.178	1 Laporan	20.713.904.888	1 Laporan	26.635.576.465	1 Laporan	27.146.499.683	1 Laporan	Bagian Umum
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	83.441.475	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	Bagian Umum
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pakaian dinas yang disediakan	100%	499.999.988	100%	495.160.449	100%	510.705.773	100%	560.000.000	100%	4.079.154.443	100%	542.259.561	100%	Bagian Umum
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	40%	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase ASN dan non ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	48%	275.000.000	-	-	59%	332.750.000	62%	366.025.000	62%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan perangkat daerah yang difasilitasi	100%	6.834.773.298	100%	6.788.649.752	100%	7.001.776.160	100%	4.818.930.383	100%	7.290.543.691	100%	7.434.378.589	100%	Bagian Umum
		Persentase pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi	100%	4.002.249.626	100%	2.574.834.335	100%	2.655.670.024	100%	2.031.634.600	100%	2.765.195.273	100%	2.961.642.518	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	6.199.999.445	100%	8.863.372.036	100%	7.141.633.353	100%	1.193.796.542	100%	5.971.266.837	100%	8.564.553.351	100%	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	36.021.343.500	100%	36.923.084.094	100%	37.959.007.454	100%	5.950.690.375	100%	39.183.714.228	100%	39.759.954.436	100%	Bagian Umum
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	100%	6.189.602.775	100%	6.620.295.203	100%	6.828.136.197	100%	7.483.158.100	100%	7.109.742.462	100%	7.250.010.336	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	5.926.868.303	100%	6.516.311.505	100%	8.720.887.984	100%	6.676.486.600	100%	6.998.071.115	100%	8.136.135.828	100%	Bagian Umum
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima	100%	1.053.680.572	100%	166.652.000	100%	166.652.000	100%	2.610.204.000	100%	166.652.000	100%	166.652.000	100%	Bagian Umum
		Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima	100%	1.538.779.428	100%	1.622.898.514	100%	1.785.188.365	100%	2.390.000.000	100%	2.160.077.922	100%	2.376.085.714	100%	
	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	100%	1.079.999.591	100%	1.069.546.568	100%	1.103.124.472	100%	847.273.751	100%	1.148.619.575	100%	1.171.280.653	100%	Bagian Umum
	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase realisasi Kegiatan Protokol	100%	299.999.900	100%	299.999.900	100%	362.999.879	100%	877.077.000	100%	439.229.846	100%	483.152.830	100%	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan	100%	1.707.756.950	100%	3.577.727.424	100%	3.139.025.890	100%	2.198.163.000	100%	3.423.366.487	100%	3.606.041.603	100%	
Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan		100%	764.131.700	100%	870.544.860	100%	924.599.357	100%	924.760.000	100%	1.118.765.120	100%	1.230.641.632	100%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	100%	1.112.608.562													

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	KERANGKA PENDANAAN DAN TARGET												KONDISI AKHIR	KET.
			2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				31.432.109.771		49.565.754.937		50.961.132.627		40.979.494.075		50.643.549.698		50.598.549.698		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100%	411.520.823	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	448.141.943	100%	600.000.000	100%	575.000.000	100%	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	1 Pelayanan	1.275.091.406	1 Pelayanan	1.281.520.572	1 Pelayanan	1.675.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	-	416.474.000	-	425.000.000	27,777778	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	313.667.743	100%	425.000.000	100%	400.000.000	100,00%	
		Persentase penegasan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik	-	-	-	-	-	-	11,111111	364.272.639	16,666667	475.000.000	22,222222	475.000.000	78,00%	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	5 MoU	68.999.743	3 MoU	75.000.000	5 MoU	125.000.000	5 MoU	248.916.943	6 MoU	175.000.000	6 MoU	175.000.000	30 MoU	Bagian Tata Pemerintahan
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	2 SK Penetapan	27.241.425.306	2 SK Penetapan	45.265.635.872	2 SK Penetapan	46.186.132.627	2 SK Penetapan	38.104.494.807	2 SK Penetapan	46.889.549.698	2 SK Penetapan	46.889.549.698	12 SK Penetapan	Bagian Kesra
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diproses	880 dokumen	457.999.611	850 dokumen	457.999.611									-	Bagian Hukum
		Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah					90%	470.000.000	90%	517.381.000	90%	490.000.000	90%	490.000.000	90%	
		Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	4 perkara	984.599.775	4 perkara	984.599.775									-	
		Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh					26 perkara dan 440 orang	995.000.000	26 perkara dan 570 orang	596.665.000	26 perkara dan 570 orang	999.000.000	26 perkara dan 570 orang	999.000.000	104 Perkara dan 2280 Orang	
Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		4	575.999.107	5	575.999.107	5	585.000.000	5	385.954.000	5	590.000.000	5	595.000.000	5		
PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	KERANGKA PENDANAAN DAN TARGET												KONDISI AKHIR	KET.
			2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		981.133.190		3.516.344.996		8.724.031.000		8.354.740.508		3.249.729.238		9.098.352.000		9.297.107.000		
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	7 Dokumen	233.765.688	6 Dokumen	2.407.605.365	5 Dokumen	1.973.963.114	4 Dokumen	624.999.711	5 Dokumen	2.233.971.719	5 Dokumen	2.195.938.817	34 Dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4 Kali	747.367.502	4 Kali	1.462.181.279	4 Kali	1.562.181.279	4 Kali	624.729.660	4 Kali	1.762.181.279	4 Kali	1.862.181.279	24 Kali	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	7	303.432.941	4	795.174.989	5	830.844.557	5	250.000.000	5	851.838.799	4	865.048.300	30	Bagian Perekonomian dan SDA
		Jumlah laporan TPID	1	680.970.839	1	1.450.000.000	1	2.343.775.344	1	225.000.000	1	2.402.998.953	1	2.440.256.871	6	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA	1	219.608.528	1	1.649.069.367	1	658.976.214	1	525.000.000	1	797.361.250	1	853.681.733	1	Bagian Perekonomian dan SDA
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	100%	1.331.199.498,00	100%	960.000.000,00	100%	725.000.000,00	100%	694.903.900,00	100%	750.000.000,00	100%	765.000.000,00	100%	BPBJ
		Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	5	260.000.000,00	5	305.095.967,00	5	300.000.000,00	5	315.000.000,00	5	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan tolak ukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2021-2026. Secara substansial, penetapan Indikator Kinerja ditelaah dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur No. Per/20/Menpan/11/2008 sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan/atau sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (2) bahwa Sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Dengan demikian penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi maka Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis Pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD dari Kemendagri
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah kebijakan yang disahkan kepala Perangkat Daerah dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan dikali 100%
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Jumlah Produk hukum yang diproses dibagi jumlah usulan produk hukum di kali 100%
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	Hasil Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
		HAM dari Kementerian Hukum dan HAM
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang capaian kinerja APBD minimal 80% dibagi jumlah Perangkat Daerah X 100%
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	Jumlah Capaian Kinerja BUMD dibagi Jumlah BUMD
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Berdasarkan Evaluasi Kemenpan RB
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Permen PanRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Permen PanRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini akan menjadi menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan semangat Nawakarsa menuju Gresik Baru.

8.1. Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Setelah berakhirnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026-2031 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan kerja tahun 2026. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 akan berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2050, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi seluruh Asisten dan Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- c. Seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik agar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum di dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan akuntabel berdasarkan prinsip *good governance* dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

**Matriks Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerj a	Indikator	Satua n	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catata n	
									SDG's	SP M	Sektor al			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp					
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
					SEKRETARIAT DAERAH																							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									133.027.565.531		161.478.482.971		165.234.505.022		104.588.744.027		170.182.877.964		172.654.519.800				
4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKO TA									98.079.110.763, 64		103.188.697.034, 00		105.918.631.887, 00		60.359.520.714, 00		110.440.976.266, 00		112.758.863.102, 00				
							Indeks Integritas Jabatan/Organis asi	-					sesuai hasil evaluasi reformasi birokrasi	1,36	1,5	322.240.081,00	1,7	400.000.000,00	1,9	529.778.801,00	2,1	400.000.000,00	2,5	478.918.802,00	2,8	454.633.368,00	Bagian Organisas i	
							Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal "A"	%					Jumlah PD dengan nilai AKIP minimal A dibagi jumlah seluruh PD dikali 100%	70,83%	75%	231.780.663,00	79%	400.000.000,00	83%	529.777.000,00	88%	300.000.000,00	92%	478.916.000,00	96%	454.633.000,00	Bagian Organisas i	
							Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	-					Jumlah IKM masing- masing Unit pelayanan dibagi Jumlah Unit Pelayanan	82,95	84	313.769.605,00	86	778.678.950,00	88	529.777.000,00	90	300.000.000,00	91	478.916.000,00	91	454.633.000,00	Bagian Organisas i	
							Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	Perse n					Jumlah temuan yang didaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan dikali 100%		100%	23.979.526.777	100%	24.970.941.444	100%	25.604.892.178	100%	20.713.904.888, 00	100%	26.635.576.465	100%	27.146.499.683	Bagian Umum	
							Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Perse n					Jumlah kegiatan pimpinan yang difasilitasi dibagi jumlah target dikali 100%		100%	56.140.429.187	100%	55.441.574.347	100%	57.182.135.973	100%	25.844.617.458, 00	100%	63.087.830.019	100%	60.857.008.154		
							Persentase Penadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Perse n					Jumlah penadaan barang milik daerah dibagi jumlah target dikali 100%		100%	7.279.999.036	100%	9.932.918.604	100%	8.394.757.825	100%	2.124.511.768.0 0	100%	7.301.386.412	100%	9.935.484.004		
							Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	Perse n					Jumlah sapras yang dipelihara dibagi target dikali 100%		100%	5.926.868.303	100%	6.516.311.505	100%	8.720.887.984	100%	6.676.486.600.0 0	100%	6.998.071.115	100%	8.136.135.828		
							Presentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang di Fasilitasi	Perse n					Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang di Fasilitasi/Juml ah Kegiatan Keprotokolan *100%	100%	100%	3.884.497.112	100%	4.748.272.184	100%	4.426.625.126	100%	4.000.000.000.0 0	100%	4.981.361.453	100%	5.319.836.065	Bagian Protokol Dan Komunika si Pimpinan	
4	0 1	0 1	2	1 3	Kegiatan Penataan Organisasi		Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	-						67	69	867.790.349	71	1.578.678.950	73	1.589.332.801	75	1.000.000.000	77	1.436.750.802	80	1.363.899.368		

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangka t Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungana n	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatana n	
										SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan OPD	%				Jumlah indikator sasaran kinerja yang tercapai dibagi jumlah seluruh indikator sasaran kinerja dikali 100%	72.97%	74.00 %		76%		78%		80%		82%		84%					
							Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah	-					48	5		5		5		5		5		5		5			
4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisa beban kerjanya	PD				48	0	322.240.081.00	48	400.000.000,00												
							Jumlah Pembahasan Permasalahan / Isu Strategis	ISU STRATEGIS					-	10		12													
							Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi jabatannya	PD					-	0		17													
							Jumlah Jabatan ASN yang telah disusun SKJ	JABATAN					48	140		377													
							Jumlah tuis perangkat daerah yang dievaluasi	PERBUP					48	48		48													
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	DOKUMEN										47	529.778.801	47	400.000.000	47	478.918.802	47	454.633.368				
4	01	01	2	13	02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya a Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM	UPP				79	80	300.808.580,00	80	778.678.950,00												
							Jumlah Inovasi yang mengikuti kompetisi	INOVASI						15		15													
							Jumlah UPP yang difasilitasi penyusunan / reviu SPP/SOP/Proses Bisnis	UPP					48	48		48													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	LAPORAN										5	529.777.000	5	300.000.000	5	478.916.000	5	454.633.000				
4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya a Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi	PD				48	48	211.599.473,00	48	400.000.000,00												
							Jumlah UPP yang difasilitasi dalam pengusulan Zona Integritas	UPP					-	-		32													

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
					SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
												10											
												5											
														10	529.777.000	10	300.000.000	10	478.916.000	10	454.633.000		
4	01	01	2	13	04			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		UPP	-	80	12.961.025,00										
								Jumlah Unit Pelayanan yang dievaluasi kualitas pelayanan publik		PD		48											
4	01	01	2	13	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		LAPORAN	1	1	20.181.190,00										
								Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik		LAPORAN	1	1											
								Jumlah Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik		PD	48	48											
								Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan kinerja Instansi Perangkat Daerah															
4	01	01	2	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan		1 Laporan	23.979.526.777	1 Laporan	25.604.892.178	1 Laporan	20.713.904.888	1 Laporan	26.635.576.465	1 Laporan	27.146.499.683	Bagian Umum	
4	01	01	2	02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			22.979.527.000		23.916.249.689		24.667.088.879		20.579.602.114		25.684.409.939		26.191.136.817
								Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diterima		Bulan		12 Bulan											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan					132 Orang/bulan		141 Orang/bulan		143 Orang/bulan		145 Orang/bulan		
4	01	01	2	02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			699.999.993		742.740.673		616.058.661		134.302.774		618.152.483		619.239.342
								Jumlah dokumen pengelolaan keuangan		Dokumen		63 dokumen	63 dokumen										
								Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi pengelolaan keuangan		Kali		24 kali	24 kali										

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan/Perangka t Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Pendhitunga n	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catata n	
											SDG's	SP M.	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
									Jumlah bagian yang SPJ nya diverifikasi	Bagian						10 bagian		10 bagian												
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Dokume n									141 Dokume n		153 Dokume n		141 Dokume n		141 Dokume n		141 Dokume n			
4	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									299.999.78 4		311.951.08 2		321.744.63 8		-		333.014.043		336.123.52 4				
									Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	Dokume n						177 dokume n		177 dokume n												
									Jumlah Rekonsiliasi/Rapat Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan dan Aset	Kali						30 kali		30 kali												
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan									10 Laporan		-		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan			
4	0 1	0 1	2	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen				Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi target dikali 100%			-	-	-	-	100%	150.000.00 0	100%	83.441.475	100%	181.500.000	100%	199.650.00 0	Bagian Umum		
4	0 1	0 1	2	0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan										15 Laporan	150.000.00 0	15 Laporan	83.441.475	15 Laporan	181.500.000	15 Laporan	199.650.00 0				
4	0 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										499.999.98 8		745.160.44 9		785.705.77 3		560.000.00 0		4.411.904.44 3		908.284.56 1	Bagian Umum			
								Persentase pakaien dinas yang disediakan					Jumlah pakaien dinas yang disediakan dibagi jumlah target dikali 100%			100%	499.999.98 8	100%	495.160.44 9	100%	510.705.77 3	100%	560.000.00 0	100%	4.079.154.44 3	100%	542.259.56 1			

Kode Rekening						Usulan/Bidang Urusan/Perangka 1 Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitung an	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN Sekretariat Daerah dikali 100%		-	-	40%	250.000.000										
								Persentase ASN dan non ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					Jumlah ASN dan non ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN dan non ASN Sekretariat Daerah dikali 100%		-	-			48%	275.000.000	0%	-	59%	332.750.000	62%	366.025.000		
4	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									499.999.988		495.160.449		510.705.773		560.000.000		4.079.154.443		542.259.561		
							Jenis Pakaian Dinas untuk Pimpinan								4 Jenis		6 Jenis											
							Jumlah Pakaian Dinas untuk Pimpinan								-		60 Setel											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan												8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket			
4	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksanany a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									-		250.000.000		275.000.000		-		332.750.000		366.025.000		
							Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan								-		2 Kali											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												152 Orang		-		192 Orang		202 Orang			
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										10.837.022.924		9.363.484.087		9.657.446.184		6.850.564.983		10.055.738.964		10.396.021.107	Bagian Umum	
							Persentase kegiatan perangkat daerah yang difasilitasi						Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi jumlah target dikali 100%		100%	6.834.773.298	100%	6.788.649.752	100%	7.001.776.160	100%	4.818.930.383	100%	7.290.543.691	100%	7.434.378.589		
							Persentase pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi						Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi dibagi jumlah target dikali 100%		100%	4.002.249.626	100%	2.574.834.335	100%	2.655.670.024	100%	2.031.634.600	100%	2.765.195.273	100%	2.961.642.518		

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Dnerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								599.999.850		594.192.538		612.846.929		422.000.000		638.121.986		650.711.474			
							Jenis komponen instalasi Listrik yang Dilakukan Pengadaan	Jenis						4 Jenis		6 Jenis												
							Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang difasilitasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangannya	Gedung								5 Gedung												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										4 Paket		7 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								1.252.499.999		1.247.804.331		1.399.333.820		590.153.383		1.457.045.202		1.485.791.199			
							Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis						4 Jenis		6 Jenis												
							Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang difasilitasi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Gedung								1 Gedung												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										5 Paket		8 Paket		5 Paket		5 Paket		5 Paket		
4	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga								1.000.089.764		990.320.898		1.021.411.548		298.000.000		1.063.536.643		1.084.519.123			
							Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Dilakukan Pengadaan	Jenis						4 Jenis		3 Jenis												
							Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang difasilitasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangganya	Gedung								2 Gedung												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket										4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		
4	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor								1.501.235.300		1.490.432.951		1.537.224.379		1.790.156.000		1.600.622.648		1.632.201.280			
							Jumlah Mamin Harian	Kali						250 kali		250 kali												
							Jumlah Mamin Kegiatan	Kali						25 kali		25 kali												
							Jumlah Mamin Rapat	Kali						60 kali		60 kali												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket										220 Paket		240 Paket		260 Paket		280 Paket		280 Paket		
4	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan								494.688.620		490.208.844		505.598.716		420.538.000		526.450.639		536.836.966			
							Jenis Barang Cetakan yang disediakan	Jenis						6 jenis		4 Jenis												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket										5 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		
4	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material								1.515.433.275		1.505.287.765		1.552.545.553		730.079.000		1.616.575.698		1.648.469.067			
							Jenis Bahan/Material Yang Dilakukan Pengadaan	Jenis						8 jenis		2 Jenis												
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket										4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangka 1 Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	0	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu									362.750.000		361.467.127		372.815.215		568.004.000		388.190.875		395.849.480		
								Jumlah Kegiatan	Kali						25 Kali													
								Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kali						25 Kali													
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan									25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		
4	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD									4.002.249.626		2.574.834.335		2.655.670.024		2.031.634.600		2.765.195.273		2.961.642.518		
								Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kali						220 kali													
								Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi	Kali						220 kali													
								Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pejabat	Kali						180 kali		195 kali											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan									400 Laporan		420 Laporan		440 Laporan		460 Laporan				
4	0	0	2	0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD										108.076.490		108.935.298										
								Jumlah Aplikasi	Aplikasi						1 Aplikasi		1 Aplikasi											
4	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persen					Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi jumlah target dikali 100%		100%	6.199.999.445	100%	8.863.372.036	100%	7.141.633.353	100%	1.193.796.542	100%	5.971.266.837	100%	8.564.553.351	Bagian Umum	
4	0	0	2	0	0																							
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									1.400.000.000	1.485.481.347						472.468.000					
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit						2 Unit		2 Unit											
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit									0 Unit		-		1 Unit		0				
4	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-	891.288.808		70.000.000		-		369.204.000		3.193.053.000			
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Unit						-	2 Unit												

Kode Rekening						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit									2		-		12		21				
4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel								1.599.999.760		1.039.836.943		1.072.482.125		250.000.000		878.955.904		896.296.796			
								Jenis Mebel	Jenis						4 Jenis		3 Jenis											
								Jumlah Unit Mebel	Unit								236 Unit											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit									228 Unit		162 Unit		93 Unit		57 Unit				
4	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya								1.799.999.920		1.782.577.616		1.838.540.786		689.796.542		1.755.290.003		1.952.134.421			
								Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jenis						10 Jenis		5 Jenis											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit									105 Unit		85 Unit		71 Unit		76 Unit				
4	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		2.277.738.065		2.800.634.275		-		1.405.050.965		1.432.771.169			
								Jenis Sarana Dan Prasarana Gedung	Jenis								5 Jenis											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit									2 Unit		-		2 Unit		2 Unit				
4	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1.399.999.765		1.386.449.257		1.359.976.167		254.000.000		1.090.297.965		1.090.297.965			
								Jenis Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung	Jenis						5 Jenis		4 Jenis											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit									4 Unit		1 Unit		2 Unit		2 Unit				
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										42.210.946.275		43.543.379.297		44.787.143.651		13.433.848.475		46.293.456.690		47.009.964.772	Bagian Umum	
								Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persen				Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dibagi target dikali 100%		100%	36.021.343.500	100%	36.923.084.094	100%	37.959.007.454	100%	5.950.690.375	100%	39.183.714.228	100%	39.759.954.436		

Kode Rekening						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	Persen				Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi dibagi target dikali 100%		100%	6.189.602.775	100%	6.620.295.203	100%	6.828.136.197	100%	7.483.158.100	100%	7.109.742.462	100%	7.250.010.336		
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat									33.100.000		32.779.621		33.808.722		14.389.775		35.203.063		35.897.583		
								Jumlah Pengiriman Paket	Kali						100 Kali		100 Kali											
								Jumlah Pengiriman Surat	Kali						30 Kali		30 Kali											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan										12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									35.988.243.500		36.890.304.473		37.925.198.732		5.936.300.600		39.148.511.165		39.724.056.853		
								Jenis Jasa Operasional Kantor	Jenis						5 Jenis		4 Jenis											
								Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dan Internet									12 Bulan											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan										60 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan			
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									904.730.775		1.386.449.257		1.429.976.167		1.799.744.100		1.488.951.301		1.518.326.772		
								Jenis Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jenis						3 Jenis		3 Jenis											
								Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi									36 Kali											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan										12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor									5.284.872.000		5.233.845.946		5.398.160.030		5.683.414.000		5.620.791.161		5.731.683.564		
								Jumlah Tenaga THL/Non ASN	Orang						192 Orang													
								Jumlah Tenaga Administrasi Kantor	Orang								153 Orang											
								Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang									30 Orang										

Kode Rekening						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah Tenaga Keamanan	Orang								4 Orang											
								Jumlah Tenaga Sogor	Orang								5 Orang											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										2304 Laporan		2304 Laporan		2304 Laporan		2304 Laporan			
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi Pemeliharaannya dibagi target dikali 100%		100%	5.926.868.303	100%	6.516.311.505	100%	8.720.887.984	100%	6.676.486.600	100%	6.998.071.115	100%	8.136.135.828	Bagian Umum	
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									560.999.760		559.531.307		577.097.524		1.057.000.000		600.898.204		612.753.304		
								Jumlah Unit Kendaraan	Unit						5 Unit													
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit								5 Unit											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit										6 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit			
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									936.309.720		1.089.352.987		1.123.552.703		1.977.000.000		1.169.890.308		1.192.971.035		
								Jumlah Unit Kendaraan	Unit						17 Unit													
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Unit								20 Unit											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit										220 Unit		69 Unit		70 Unit		83 Unit			

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							Jumlah Tenaga Sopir	Orang								5 Orang												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										2304 Laporan		2304 Laporan		2304 Laporan		2304 Laporan				
4	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi Pemeliharaannya dibagi target dikali 100%		100%	5.926.868.303	100%	6.516.311.505	100%	8.720.887.984	100%	6.676.486.600	100%	6.998.071.115	100%	8.136.135.828	Bagian Umum		
4	0 1	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								560.999.760		559.531.307		577.097.524		1.057.000.000		600.898.204		612.753.304			
							Jumlah Unit Kendaraan	Unit						5 Unit														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit							5 Unit													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit										9 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		
4	0 1	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								936.309.720		1.089.352.987		1.123.552.703		1.977.000.000		1.169.890.308		1.192.971.035			
							Jumlah Unit Kendaraan	Unit						17 Unit														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Unit							20 Unit													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										220 Unit		69 Unit		70 Unit		83 Unit				
4	0 1	0 1	2	0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel								129.999.756		128.741.716		132.783.501		99.000.000		138.259.764		140.987.486			
							Jumlah Mebel Yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit						120 Unit		120 Unit												
							Jenis Mebel yang Dilakukan Pemeliharaan	Jenis							3 Jenis													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit										500 Unit		610 Unit		772 Unit		865 Unit				
4	0 1	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								922.499.857		916.046.830		944.805.682		365.000.000		983.771.395		1.003.180.189			
							Jenis Peralatan Dan Mesin Yang Dilakukan Pemeliharaan	Jenis						14 Jenis		6 Jenis												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										820 Unit		405 Unit		820 Unit		820 Unit				

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungannya	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidan g	Catata n
											SDG's	SP M	Sektora l			Target l	Rp	Target	Rp	Target l	Rp	Target l	Rp	Target l	Rp	Target l	Rp		
4	01	01	2	0	9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tertaksanany a Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									1.918.059.410		2.277.738.065		4.349.246.560		2.381.486.600		2.446.134.280		3.494.393.983		
								Jumlah Gedung/Bangunan lainnya yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit							5 Unit		5 Gedung											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit											5 Unit		7 Unit		5 Unit		5 Unit			
4	01	01	2	0	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tertaksanany a Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									349.999.800		445.644.404		459.635.196		245.000.000		478.591.490		488.033.605		
								Jenis Sarana Dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan	Jenis							5 Jenis		5 Jenis											
								Jumlah Gedung Kantor yang difasilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarannya	Gedung									5 Gedung											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit											5 Unit		7 Unit		5 Unit		5 Unit			
4	01	01	2	0	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tertaksanany a Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									1.109.000.000		1.099.256.196		1.133.766.818		552.000.000		1.180.525.674		1.203.816.226		
								Jenis Sarana Dan Prasarana Pendukung Yang Dilakukan Pemeliharaan	Jenis							17 Jenis		4 Jenis											
								Jumlah Gedung Kantor yang difasilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Gedung									5 Gedung											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit											5 Unit		9 Unit		5 Unit		5 Unit			
4	01	01	2	1	1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										2.592.460.000		1.789.550.514		1.951.840.365		5.000.204.000		2.326.729.922		2.542.737.714	Bagian Umum	
								Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima	Persen							100%		100%		100%		100%		100%		100%			
								Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima dibagi target dikali 100%																					

Kode Rekening						Unsur/Bidang Urutan/Perangka I Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penhitungan n	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidan g	Catata n
										SDG' s	SP M	Sektora I			Target I	Rp	Target I	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Persen				Jumlah penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan dibagi target dikali 100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
4	0 1	0 1	2	1 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediany a Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.053.680.57 2		166.652.000		166.652.000		2.610.204.00 0		166.652.000		166.652.000				
							Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan						12 bulan		12 bulan												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bula n									2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n			
4	0 1	0 1	2	1 1	0 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediany a Dana Penunjang Operasiona I Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.538.779.42 8		1.622.898.51 4		1.785.188.36 5		2.390.000.00 0		2.160.077.92 2		2.376.085.71 4				
							Jumlah penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan						12 bulan		12 bulan												
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasiona I Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bula n									2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n		2 Orang/Bula n			
4	0 1	0 1	2	1 2		Fasilitasi Kerumahtanaqaa n Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tanqaa yang disediakan	Persen				Jumlah komulatif penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan dibagi target dikali 100%		100%	1.079.999.59 1	100%	1.069.546.56 8	100%	1.103.124.47 2	100%	847.273.751	100%	1.148.619.57 5	100%	1.171.280.65 3	Bagia n Umum		

Kode Rekening						Unsur/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitung an	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catat an
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	0	1	0	2	1	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								579.999.870		574.386.120		592.418.698		479.000.000		616.851.253		629.021.091		
								Jenis Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Jenis						2 Jenis		2 Jenis											
								Jumlah bulan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Bulan								12 Bulan											
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket										3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket			
4	0	1	0	2	1	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								459.999.986		455.547.613		469.849.312		340.000.000		489.226.856		498.878.797		
								Jenis Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	Jenis						2 Jenis		2 Jenis											
								Jumlah bulan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	Bulan								12 Bulan											
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket										3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket			
4	0	1	0	2	1	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah								39.999.735		39.612.835		40.856.462		28.273.751		42.541.466		43.380.765		
								Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jenis						1 Jenis		1 Jenis											
								Jumlah bulan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Bulan								12 Bulan											
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	Paket										2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket			
4	0	1	0	2	1		Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan									2.771.888.550		4.748.272.184		3.502.025.769		4.000.000.000		4.981.361.453		5.319.836.065		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghituna n	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
					SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah realisasi Kegiatan Keprotokolan dibagi jumlah target keprotokolan dikali 100%	100%	100%	299.999.900	100%	299.999.900	100%	362.999.879	100%	877.077.000	100%	439.229.846	100%	483.152.830	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
								Jumlah Publikasi kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.707.756.950	100%	3.577.727.424	100%	3.139.025.890	100%	2.198.163.000	100%	3.423.366.487	100%	3.606.041.603	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
								Jumlah Dokumentasi kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	100%	100%	764.131.700	100%	870.544.860	100%	-	100%	924.760.000	100%	1.118.765.120	100%	1.230.641.632	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
4	01	01	2	14	1			Fasilitasi keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan		299.999.900		299.999.900		300.000.000		877.077.000		439.229.846		483.152.830		
								Jumlah kegiatan keprotokolan	Kegiatan	1920 kegiatan	1920 kegiatan	299.999.900	1920 kegiatan	299.999.900									
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan					1920	300.000.000	1920	877.077.000	1920	439.229.846	1920	483.152.830		
4	01	03	2	02	02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan		1.707.756.950		3.577.727.424		2.972.639.979		2.198.163.000		3.423.366.487		3.606.041.603		
								Jumlah berita yang di publikasikan	Berita	365 berita	1.707.756.950	365	3.577.727.424										
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Laporan					365	2.972.639.979	365	2.198.163.000	365	3.423.366.487	365	3.606.041.603		
4	01	03	2	02	03			Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		764.131.700		870.544.860		600.000.000		924.760.000		1.118.765.120		1.230.641.632		
								Jumlah Majalah Warta Giri yang dicetak	Eksemplar	6 edisi x 2700 eksemplar	9900 eksemplar	764.131.700	9900 eksemplar										
								Jumlah Media cetak yang disediakan	Media	24 media	22 media		22 media										
								Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan	Kali	1920 kali	1920 kali		1920 kali										
								Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan.	Laporan					1.920	600.000.000	1.920	924.760.000	1.920	1.118.765.120	1.920	1.230.641.632		
4	01	01	2	5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.112.608.562											Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
								Persentase realisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan		-	100%	1.112.608.562											

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerj a	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghituna n	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catata n	
										SDG' s	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
4	0	0	2	0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Media yang dipakai untuk penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	Media					-	21 media	1.112.608.562													
								Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang																				
4	0	0				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT										31.432.109.77 1		49.565.754.93 7		50.961.132.62 7		40.979.494.075.0 0		50.643.549.69 8		50.598.549.69 8			
								Persentase pemenuhan data dukung IKK	Persen				Jumlah data dukung IKK dibagi jumlah IKK dikali 100%	100%	100%		100%	2.281.520.572	100%	2.725.000.000	100%	1.374.999.268	100%	1.675.000.000	100%	1.625.000.000	100%	Bagian Tata Pemerintaha n	
								Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraa n Rakyat	Indeks / Predikat				Rata-rata Persentase Capaian Fisik Kegiatan Kesra: Predikat 1. Sangat Baik 2. Baik Sekali 3. Baik 4. Cukup Baik 5. Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	27.241.425.30 6	Baik	45.265.635.87 2	Baik	46.186.132.62 7	Baik	38.104.494.807	Baik	46.889.549.69 8	Baik	46.889.549.69 8	Bagian Kesra		
								Persentase Perda yang diproses	Persen				Jumlah Perda yang diproses dibagi Jumlah Perda yang diusulkan dikali 100%	90%	90%	2.018.598.493	90%	2.018.598.493	90%	2.050.000.000	90%	1.500.000.000	90%	2.079.000.000	90%	2.084.000.000	90%	Bagian Hukum	
								Persentase Perbup yang diproses	Persen				Jumlah Perbup yang diproses dibagi Jumlah Perbup yang diusulkan dikali 100%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	90%			
								Persentase Keputusan Bupati yang diproses	Persen				Jumlah Keputusan Bupati yang diproses dibagi Jumlah Keputusan Bupati yang diusulkan dikali 100%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	90%			
4	0	0	2	0	1	Administrasi Tata Pemerintahan										2.103.086.229											Bagian Tata Pemerintaha n		
								Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	Persen					100%	100%	411.520.823	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	448.141.943	100%	600.000.000	100%	575.000.000	100%		
								Jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	Pelayana n				5 Pelayana n	1 Pelayana n	1.275.091.406	1.281.520.572	1.281.520.572	1.675.000.000											
								Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	Persen										27.7778	425.000.000									

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penhitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
					SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	Persen				Jumlah kecamatan dan kelurahan yang pelayannya difasilitasi dibagi jumlah kecamatan dan kelurahan dikali 100%								100%	313.667.743	100%	425.000.000	100%	400.000.000		
			Persentase pelayanan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik	Persen				Jumlah kecamatan yang dilakukan penegasan batas secara kartometrik dibagi jumlah kecamatan dikali 100% .Perhitungan tahun berjalan merupakan akumulasi dengan tahun sebelumnya								11,1111	364.272.639	16,6667	475.000.000	22,2222	475.000.000		
4	01	02	2	01	01			Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertaksanany a Penataan Administrasi Pemerintahan		1.275.091.406		1.281.520.572		1.675.000.000		313.667.743		425.000.000		400.000.000		Anggaran Rapat Forkopimda Beralih ke Kesbangpolinn as sebesar Rp. 1,3 Milyar
			Jumlah Aplikasi Pelayanan (SIPELANDUK) yang dikembangkan	Aplikasi					1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi											
			Jumlah Pembinaan PATEN	Kecamatan					18 Kecamatan	18 Kecamatan		18 Kecamatan											
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan					18 Kecamatan n 26 Kelurahan	18 Kecamatan n 26 Kelurahan		18 Kecamatan n 26 Kelurahan											
			Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba sinergitas	Kecamatan					18 Kecamatan	18 Kecamatan		18 Kecamatan											
			Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Kecamatan					18 Kecamatan	18 Kecamatan		18 Kecamatan											
			Jumlah Fasilitas Rapat Forkopimda	Rapat					26 Rapat	24 Rapat		24 Rapat											
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen										1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
4	01	02	2	01	02			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tertaksanany a Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		416.474.000		425.000.000		425.000.000		364.272.639		475.000.000		475.000.000		
			Jumlah Dokumen Peneqasan Batas	Dokumen					2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen											

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
					SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									10 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen											
														2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
4	01	02	2	01	03			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		411.520.823		500.000.000		500.000.000		448.141.943		600.000.000		575.000.000		
									1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan											
									-	4 Orang		-											
									12 Kunjungan	12 Kunjungan		24 Kunjungan											
									1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan											
														2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
4	01	02	2	04				Fasilitasi Kerja Sama Daerah			68.999.743											Bagian Tata Pemerintahan	
									5 MoU	5 MoU	68.999.743	3 MoU	75.000.000	5 MoU	125.000.000	5 MoU	248.916.943	6 MoU	175.000.000	6 MoU	175.000.000		
4	01	02	2	04	01			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		68.999.743		75.000.000		125.000.000		248.916.943		175.000.000		175.000.000		
									13 Rapat	20 Rapat		20 Rapat											
														5 Dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen			
4	01	02	2	02				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			27.241.425.306		45.265.635.872		46.186.132.627		38.104.494.807		46.889.549.698		46.889.549.698		Bagian Kesra
									2 SK Penetapan	2 SK Penetapan	27.241.425.306	2 SK Penetapan	45.265.635.872	2 SK Penetapan	46.186.132.627	2 SK Penetapan	38.104.494.807	2 SK Penetapan	46.889.549.698	2 SK Penetapan	46.889.549.698		

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan/Perang kat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Pendahitunaa n	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidan g	Catata n
											SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	0 1	0 2	2	0 2	0 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksanany a Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									4.818.433.268		5.745.387.124		6.581.762.654		7.695.399.895		7.239.938.920		7.239.938.920			
							Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik untuk Pelaksanaan MTQ Kabupaten										700 Orang												
							Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik yang difasilitasi untuk pengiriman MTQ Tingkat Provinsi						25 Orang	54 orang															
							Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik yang difasilitasi untuk pengiriman tingkat Nasional							6 Orang															
							Jumlah Peringatan Hari Besar Islam dan Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan						1 PHBI	3 PHBI			3 PHBI												
							Jumlah Takmir Masjid, Pengurus UPZ dan LPTQ yang dibina						1 Kegiata n	3 Kegiata n			3 Kegiata n												
							Jumlah Pemberangkata n Jama'ah Haji						0 Kegiata n	1 Kali			1 Kali												
							Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan						0 Kegiata n	100 Ekor			110 Ekor												
							Jumlah Pelaksanaan Halagah Ulama' dan Umaro'										5 Kali												
							Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan uang keahormatan										10.156 Orang												
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Dokume n										13 Dokume n		13 Dokume n		13 Dokume n		13 Dokume n				
4	0 1	0 2	2	0 2	0 2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksanany a Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n dan Catatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								21.602.297.10 4		38.699.553.81 4		38.699.553.81 4		30.009.094.91 2		38.699.553.81 4		38.699.553.81 4				

[illegible]

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan/Perangk at Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penhitungana n	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidan g	Catata n
											SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									Jumlah Peserta Lomba Senam UKS/IM Tim Pelaksana (Lembaga) Kecamatan Se-Kabupaten					0 Kecamatan	16 Kecamatan	90.674.737,00	16 Kecamatan	90.674.737,00											
									Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani karyawan di lingkungan Pemkab					20 OPD	20 OPD		20 OPD												
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyaluran Santunan Kematian					16 Kecamatan	16 Kecamatan	92.200.684,00	16 Kecamatan	92.200.684,00											
									Jumlah peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanggaulanangn HIV-AIDS					350 Orang	350 Orang	109.297.370,00	350 Orang	109.297.370,00											
									Jumlah peserta Rakor Komisi Daerah Lansia Kecamatan & Kabupaten Gresik					0 Orang	250 Orang	70.778.785,00	250 Orang	70.778.785,00											
									Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranlitubum Linmas	Dokumen									11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen				
4	0	0	2	2	0	3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tertaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							2.018.598.493		2.018.598.493		2.050.000.000		1.500.000.000		2.079.000.000		2.084.000.000		Bagia n Hukum	
									Jumlah Produk Hukum yang diproses					708 dokumen	880 dokumen	457.999.611	850 dokumen	457.999.611											
									Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi Perda dibagi jumlah rancangan perda yang diusulkan dikali 100%										90%	470.000.000	90%	517.381.000	90%	490.000.000	90%	490.000.000			
									Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi					4 perkara	4 perkara	984.599.775	4 perkara	984.599.775											
									Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh										26 perkara dan 440 orang	995.000.000	26 perkara dan 570 orang	596.665.000	26 perkara dan 570 orang	999.000.000	26 perkara dan 570 orang	999.000.000			

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Peranoka t Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catata n
										SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)					Perhitunganny a sesuai Pemeranpan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE		4	575.999.10 7	5	575.999.10 7	5	585.000.00 0	5	385.954.00 0	5	590.000.00 0	5	595.000.00 0		
4	0	0	2	0	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksanany a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									457.999.61 1		457.999.61 1		470.000.00 0		517.381.00 0		490.000.00 0		490.000.00 0	Sub Bagian Produk Hukum Daerah	
								Jumlah koordinasi dan konsultasi permasalahan peraturan- undangan	kali					32 kali	30		30 kali											
								Jumlah Perda yang diproses	Dokumen					8 dokume n	10 dokume n		10 dokumen											
								Jumlah Perpu yang diproses	Dokumen					40 dokume n	40 dokume n		40 dokumen											
								Jumlah Keputusan Bupati yang diproses	Dokumen					800 dokume n	800 dokume n		800 dokumen											
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dalam Prolegda	Dokumen					8 dokume n	10 dokume n		10 dokumen											
								Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen									700 dokume n		700 dokume n		1000 dokume n		700 dokume n			Sub Bagian Produk Hukum Daerah	
4	0	0	2	0	0	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksanany a Fasilitasi Bantuan Hukum									984.599.77 5		984.599.77 5		995.000.00 0		596.665.00 0		999.000.00 0		999.000.00 0	Sub Bagian Bantuan dan Penyuluha n Hukum	
								Jumlah perkara litigasi yang difasilitasi	perkara					5 perkara	4 perkara		4 perkara											
								Jumlah perkara non litigasi yang terselesaikan	kasus					6 kasus	4 kasus		7 kasus											
								Jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin	perkara					-	-		5 perkara											
								Jumlah Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum	regu					3 regu	3 regu		-											
								Jumlah peserta Temu Kader Keluarga Sadar Hukum	orang					-	-		200 orang											
								Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	orang					-	120 orang		120 orang											
								Jumlah Desa/Keluraha n sadar hukum	desa / kelurahan					-	-		4 desa / kelurahan											
								Jumlah Peta Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan	kecamatan					-	-		4 kecamatan											
								Jumlah peserta Diklat Legal Drafting dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	orang					-	7 orang		10 orang											

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catata n	
											SDG's	SP M	Sektor al			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
									Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	kasus									26 kasus		26 kasus			26 kasus		26 kasus		Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum		
4	01	02	2	03	03		Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								575.999.107		575.999.107		585.000.000		385.954.000		590.000.000		595.000.000		Sub Bagian Kajian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum		
									Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundang-undangan, Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	buku				1825 buku	1440 buku															
									Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan	orang				-	425 orang															
									Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokume n				5 dokume n	3 dokume n															
									Jumlah produk hukum yang terdokumentasik an	Dokume n				708 dokume n	880 dokume n															
									Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokume n									700 dokume n		700 dokume n			1000 dokume n		700 dokume n				
4	01	03					PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N										3.516.344.996		8.724.031.000		8.354.740.508		3.249.729.238,00		9.098.352.000		9.297.107.000			
									Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	Persen				100%	100%			100%	3.869.786.644	100%	3.536.144.393	100%	1.249.729.371	100%	3.996.152.998	100%	4.058.120.096		Bagian Administrasi Pembangunan	
									Nilai Evaluasi Kinerja TPID	Nilai				Hasil penilaian dari TPID	60	67		67.5	3.894.244.356	67.9	3.833.596.115	68.4	1.000.000.000	68.75	4.052.199.002	69	4.158.986.904		Badian Perekonomi an dan SDA BPBJ	
									Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks				Perhitungan n ya Sesuai PemrenPan no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat	3	3		3	960.000.000	3	985.000.000	3	999.999.867	3	1.050.000.000	3	1.080.000.000			
4	01	03	2	02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										981.133.190		3.869.786.644		3.536.144.393		1.249.729.371		3.996.152.998		4.058.120.096		Bagian Administrasi Pembangunan	
									Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Dokume n					7 Dokume n	233.765.688		6 Dokume n	2.407.605.365	5 Dokume n	1.973.963.114	4 Dokume n	624.999.711	5 Dokume n	2.233.971.719	5 Dokume n	2.195.938.17			
									Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kali					4 Kali	747.367.502		4 Kali	1.462.181.279	4 Kali	1.562.181.279	4 Kali	624.729.660	4 Kali	1.762.181.279	4 Kali	1.862.181.279			
4	01	03	2	02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									233.765.688		2.407.605.365		1.973.963.114		624.999.711		2.233.971.719		2.195.938.17			

Kode Rekening						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah Buku Renja Sekretariat Daerah	Buku					15 Buku	55 Buku		30 Buku											
								Jumlah Buku Renstra Setda Tahun 2021 s/d 2026	Buku					-	55 Buku		-											
								Jumlah Buku Standar Analisa Biaya	Buku					85 Buku	60 Buku		60 Buku											
								Jumlah Rapat Koordinasi tentang Permasalahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kali					10 Kali	25 Kali		25 Kali											
								Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Kebijakan								1 Kebijakan											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen										5 Dokumen		4 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen			
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									431.907.704		732.181.000		782.181.000		441.999.814		882.181.000		932.181.000		
								Jumlah buku pedoman kerja dan pelaksanaan tugas	Buku					260 Buku	491 Buku		2 Dokumen											
								Jumlah rapat koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Kali					7 Kali	11 Kali		20 Kali											
								Jumlah rapat permasalahan perangkat daerah	Kali					5 Kali	7 Kali													
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan										1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									315.459.798		730.000.279		780.000.279		182.729.846		880.000.279		930.000.279		
								Jumlah buku laporan realisasi kinerja SKPD se Kabupaten Gresik	Buku					64 buku	84 Buku		12 Laporan											
								Jumlah Pelaksanaan Review APBD	Kali					5 Kali	3 Kali		3 Kali											
								Pemeliharaan / pengembangan Aplikasi E - Controlling	Aplikasi					1 Aplikasi	1 Aplikasi		-											
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan										12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangka t Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungana n	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatana
										SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
4	01	03	2	0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									984.403.78 0		2.245.174.98 9		3.174.619.90 1		475.000.00 0		3.254.837.75 2		3.305.305.17 1	Bagian Perekonomia n dan SDA		
							Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	Dokumen					7		4		5		5		5		4					
							Jumlah laporan TPID	Laporan				1		1			1		1		1		1					
4	01	03	2	0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya a Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								303.432.94 1		795.174.989		830.844.557		250.000.00 0		851.838.799		865.048.300			
							Jumlah unit pelayanan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Unit Pelayana n					17 Puskesmas	16 Unit Pelayana n														
							Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	Kali					2 Kali	2 kali														
							Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	Kali					12 Kali	8 kali														
							Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan					7	17 Laporan														
							Jumlah Kajian tentang Potensi Bisnis BUMD	BUMD						2 BUMD														
							Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen									5		5		5		5					
4	01	03	2	0 1	0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya a Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								119.939.74 9		800.000.000		807.588.714		150.000.00 0		827.995.029		840.829.295			
							Jumlah Pelaksanaan High Level Meeting TPID	Kali					6 Kali	6 Kali														
							Jumlah pelaksanaan Capacity Building TPID	Kali					0 Kali	-			1 Kali											
							Jumlah Pelaksanaan Sidak Sembako dan Bahan Penting Lainnya	Kali					0	1 kali			2 Kali											
							Jumlah Operasi Bersama Pemberantasa n Barang Kena Cukai Ilegal	Kali					0	-			18 Kali											
							Jumlah Lokakarya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kali					0	-			2 Kali											

Kode Rekening						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah Kajian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kajian					0	-		1 Kajian											
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distri busi Perekonomian	Laporan										4		4		4		4			
4	01	03	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									561.031.090		650.000.000		1.536.186.630		75.000.000		1.575.003.924		1.599.427.576		
								Jumlah Event Kontes Bandeng Tradisional	Kali					0	1 kali		1 Kali											
								Jumlah Peserta Sosialisasi kredit Lunak Bagi Usaha Mikro	Orang					0	50 Orang		50 Orang											
								Jumlah Sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kali					0	-		2 Kali											
								Jumlah Kajian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kajian					0	-		1 Kajian											
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen										1		1		1		1			
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										219.608.528		1.649.069.367		658.976.214		525.000.000		797.361.250		853.681.733	Bagian Perekonomian dan SDA	
								Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA	Laporan						1		1		1		1		1		1			
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja									76.501.740		1.249.069.367		485.817.000		425.000.000		587.838.600		623.206.818		
								Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kali					0	-		4 Kali											
								Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan	Laporan					0	1 Laporan		1 Laporan											

Kode Rekening						Ususan/Bidang Ususan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							Jumlah Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal	Kali					0			50 Kali												
							Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai	Kali					0			4 Kali												
							Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang bersumber dari DBH CHT	Orang					0			300 Orang												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal , Tenaga Kerja	Dokumen										1		1		1			1			
4	01	03	2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian								62.647.888		200.000.000		75.803.945		50.000.000		91.722.774		100.895.051			
							Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kali					1 kali	1 Kali		1 Kali												
							Jumlah Laporan Monev Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kali					1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan												
							Jumlah Kajian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kajian						1 Kajian		1 Kajian												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian	Dokumen											1		1		1		1			

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangka t Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baselin e 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidan g	Catata n
										SDG's	SP M	Sektora l			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
4	01	03	2	04	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan							80.458.900	200.000.000	97.355.269	50.000.000	117.799.876	129.579.864									
							Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	Kali				1 Kali	3 kali	4 kali														
							Jumlah Laporan Monev Kebijakan Energi dan Air	Laporan				1 Laporan	1 Lapora n	1 Lapora n														
							Jumlah Kajian terkait Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kajian					1 Kajian															
							Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan energi dan air, pekerjaan umum dan Penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	Dokume n									1	1	1	1								
4	01	03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1.331.199.498.00	960.000.000.00	985.000.000.00	999.999.867.00	1.050.000.000.00	1.080.000.000.00	BPBJ								
							Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	Persen				Jumlah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dibagi jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik yang direncanakan pada SIRUP dikali 100%	100%	100%	1.331.199.498.00	960.000.000.00	100%	725.000.000.00	100%	694.903.900.00	100%	750.000.000.00	100%	765.000.000.00				
							Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	indeks				Perhitungannya sesuai Permennan No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE					5	260.000.000.00	5	305.095.967.00	5	300.000.000.00	5	315.000.000.00				

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
										SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	01	03	2	03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa																					
							Jumlah Paket Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Paket						168 paket	150 paket	399.999.828,00	155 paket	410.000.000,00										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen											160 dokumen	425.000.000,00	165 dokumen	402.499.900,00	170 dokumen	450.000.000,00	175 dokumen	465.000.000,00		
4	01	03	2	03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Pengadaan Secara Elektronik																					
							Jumlah Paket Pengadaan Secara Elektronik yang Tertib Administrasi	Paket						168 paket	150 paket	499.999.849,00	155 paket	250.000.000,00										
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen											160 dokumen	260.000.000,00	165 dokumen	305.095.967,00	170 dokumen	300.000.000,00	175 dokumen	315.000.000,00		
4	01	03	2	03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tertaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																					
							Jumlah Peserta Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Orang						337 orang	200 orang	431.199.821,00	210 orang	300.000.000,00										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang											210 orang	300.000.000,00	220 orang	292.404.000,00	230 orang	300.000.000,00	240 orang	300.000.000,00		